**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

*Middle East* adalah isitlah untuk kawasan Timur Tengah. Timur Tengah merupakan sebuah kawasan yang menarik untuk di bahas, dimana kawasan ini merupakan sumber terbesar penghasil minyak dan merupakan kawasan yang rawan akan konflik. Perkembangan politik regional Timur Tengah tidak mungkin dapat dilihat terlepas dari perkembangan politik global.[[1]](#footnote-2) Dalam konteks abad 20 kawasan Timur Tengah ditengarai sebagai pusaran konflik dunia.[[2]](#footnote-3) Konflik yang pernah terjadi yaitu konflik antar suku, ras dan konflik yang paling hangat saat ini adalah penggulingan kekuasaan (pengkudetaan) yang bisa disebut sebagai upaya pencapaian demokratisasi. Diakhir tahun 2010 hingga pertengahan 2011, upaya demokratisasi banyak terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk di negara Tunisia.

Pada saat itu Masyarakat menuntut mundurnya presiden Tunisia yang menjabat melalui kudeta yaitu Zine El Abidin Ben Ali yangtelah menjabat hampir 24 tahun, dibawah kekuasaannya yang diktator, berbagai pelanggaran hak asasi manusia dan masalah-masalah lainnya terjadi di negara ini seperti kekerasan fisik, pembungkaman media pers, tingginya angka pengangguran, kemiskinan, kebebasan berpendapat dan kebebasan berpolitik. Yang membuat masyarakat Tunisia melakukan gelombang aksi turun ke jalan dalam skala besar dan juga demonstransi karena ketidakpuasan dan kemarahan mereka akan kepemimpinan Ben Ali, membuat Ben Ali diturunkan secara paksa oleh rakyat Tunisia.

Lalu seorang pemuda yang bernama Muhamad Bouazizi, seorang pedagang kaki lima membakar diri di Sidi Bouzid, Tunisia. Bouazizi tidak bermaksud memulai sebuah revolusi di Tunisia. Ia tidak tahu dan tidak memperkirakan bahwa tindakannya ternyata memotivasi rakyat disejumlah negara-negara Timur Tengah untuk bergerak memperjuangkan perubahan sosial, politik, reformasi demokratik, melawan rezim yang berkuasa, pada ujungnya menyingkirkan penguasa yang diangggap otoritarian, yang dianggap diktator dan hanya mementingkan diri, keluarga serta kelompoknya saja. Rezim diktator, pelanggaran HAM, kemiskinan, pengangguran, naiknya harga kebutuhan pokok, terlantarnya nasib buruh, korupsi, monopoli kekayaan adalah sekian dari faktor yang menyebabkan terjangkitnya virus revolusi di negara-negara Timur Tengah.

Bouazizi hanyalah pemantik. Sebab sebelum aksi bakar dirinya, masalah-masalah ekonomi – politik sudah cukup pelik dan mengendap lama. Apa yang dilakukan Bouazizi menjadi simbol gerakan lokaldan kerusuhan yang pada akhirnya melanda seluruh Tunisia bahkan melintasi perbatasan dan mengobarkan pergolakkan disejumlah negara Timur Tengah.Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa tingkat pengangguran dan ekonomi merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya demokratisasi di Tunisia.

Fenomena ini menjadi “inspirasi” bagi masyarakat di negara lain yaitu contohnya seperti Mesir, yang dipimpin oleh presiden Husni Mubarak selama hampir 30 tahun lamanya untuk melakukan penurunan paksa terhadap kekuasaaan diktator Mubarak pada tanggal 25 Oktober 2011, revolusi ini terjadi selama 18 hari penuh dengan kekerasan dan konflik antara rakyat dengan pasukan pemerintahan Mubarak.

Sejak saat itu, Arab Spring telah terjadi di Tunisia dan Mesir, Perang saudara di Libya, Pemberontakan Sipil di Bahrain dan Suriah, Protes-protes kecil di Kuwait, dsb. Ada pandangan lain yang mengatakan Arab Spring ialah gelombang Revolusi unjuk rasa dan protes yang terjadi di dunia Arab. Sebuah Revolusi yang bertujuan untuk menggulingkan diktator yang berkuasa di negara-negara Timur Tengah. Peristiwa gelombang revolusi seperti ini terus menerus berlanjut ke berbagai negara di Timur Tengah dan juga Afrika Utara seperti Yaman, Suriah, Bahrain, Iraq, Kuwait, Yordania, Lebanon, Maroko, Oman, Arab Saudi, dan Sudan.

Dari berbagai revolusi di beberapa negara di Timur Tengah dan Afrika memiliki persamaan, yaitu adanya pengaruh kekuasaan diktator yang cenderung absolut dan identik dengan pembatasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang membuat masyarakat di negara-negara tersebut tidak puas dan marah sehingga melakukan perlawanan dan usaha penurunan paksa setiap pemimpin diktator di negaranya dan menuntut kepemimpinan atau kekuasaan yang demokratis.

Di lain sisi, Arab Spring telah menjadi bagian penting dari fenomena HI kontemporer, dimana revolusi di beberapa negara dan memberikan kesejukan ditengah panasnya kondisi dan suasana politik di Timur Tengah

Berdasarkan beberapa definisi Arab Spring tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Arab Spring ialah suatu bentuk protes massa (revolusi) yang bertujuan untuk menggulingkan, menurunkan, melengserkan serta mengkudeta para pemimpin negara karena telah bertindak dictator, otoriter, korup, dan menindas rakyat dalam memimpin. Dalam Bahasa sederhananya rakyat (massa) turun ke jalan melakukan demonstrasi dan protes terhadap pemerintah, sekaligus menuntut presiden turun dari jabatannya. Itulah revolusi yang sedang terjadi di dunia arab.

Dalam Arab Spring atau revolusi negara-negara Timur Tengah tersebut, yang menjadi motor penggeraknya adalah para pemuda berpendidikan di masing-masing negara yang dilanda isu revolusi. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan otoriter sudah tidak tepat diterapkan di negara mereka. Mereka pun ingin mengubah system negara menjadi demokrasi. Dalam prosesnya, mereka menghimpun dukungan melalui berbagai media, terutama media sosial.

Munculnya revolusi di negara-negara Timur Tengah itu bukan tanpa dukungan pihak lain. Justru, banyak pendapat yang beranggapan bahwa revolusi Timur Tengah itu tak lepas dari campur tangan luar negeri (seperti Uni Eropa, Amerika Serikat dan sekutunya, serta negara-negara Timur Sosialis yang memiliki kepentingan terhadap Timur Tengah) dalam setiap aksi massa yang terjadi di negara yang sedang dilanda isu revolusi.

Kejadian Arab Spring ini awalnya mengarah kepada perubahan peta politik di kawasan Timur Tengah, dengan gugurnya para pemimpin Arab yang mengusung gaya diktator dalam mengelola kekuasaan, mulai menampakkan kilas balik yang menguntungkan Israel, yaitu rontaoknya kekuatan militer negara-negara Arab yang dinilai menjadi ganjalan kuat terhadap perkembangan Israel dalam menundukkan Palestina. Akibatnya, agar bisa berkembang, banyak dari negara tersebut harus memulai dari nol dalam menata kehidupan sosial yang telah banyak mengalami kemelut internal sekaligus mengelola ekonomi negara yang telah jatuh terpuruk, serta memulai lagi membina kekuatan militer yang porak-poranda oleh keributan internal mereka. Namun yang menjadi pemicu paling menentukan justru situasi dan kondisi yang meliputi negara di Timur Tengah yang bersangkutan, terutama adanya kesenjangan sosial yang timpang, antara pemegang kekuasaan (pemerintah/rezim berkuasa) dengan masyarakat (rakyat). Berdasarkan pemaparan yang telah penulis gambarkan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : “**Revolusi di Tunisia dan Pengaruhnya terhadap Proses Demokratisasi di Negara-negara Timur Tengah”**

1. **Identifikasi Masalah**
2. Bagaimana latar belakangterjadinya demokratisasi di Tunisia?
3. Bagaimana pengaruh demoktarisasi Tunisia terhadap negara- negara Timur Tengah?
4. Sejauh mana negara-negara Arab terpicu untuk melakukan demokratisasi?
5. **Batasan Masalah**

Mengingat permasalahan diatas begitu kompleks dan luasnya masalah yang akan diteliti, maka penulis akan membatasi pembahasanpenelitian ini dengan lebih menekankan kepada : Demokratisasi Tunisia dan Demokratisasi dinegara-negara Timur Tengah lainnya.

1. **Perumusan Masalah**

Sejauh mana pengaruhrevolusi Tunisia terhadap proses demokratisasi di negara-negara Timur Tengah?

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
2. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, menjelaskan dan memaparkan tentang latar belakang demokratisasi Tunisia yang mempengaruhi kawasan Timur Tengah
2. Untuk memberikan penjelasan tentang pengaruh demokratisasi Tunisia terhadap negara-negara di kawasan Timur Tengah
3. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan negara-negara Timur Tengah dalam pencapaian demokratisasi
4. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh daripada penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam menempuh ujian sarajana program strata satu jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan, Bandung
2. Untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi di suatu negara dan masalah yang terjadi
3. Untuk memberikan informasi dan menjadi bahan kajian bagi mahasiswa, khususnya studi Hubungan Internasional serta pengkaji masalah-masalah internasional, khusunya masalah di kawasan Timur Tengah.
4. Untuk memberikan informasi dan gambaran bagi para pembuat kebijakan, terutama pemerintah Indonesia dalam membuat kebijakan kepada negara-negara Timur Tengah mengenai demokrasi.
5. **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**
6. **Kerangka Teoritis**

Sebelum penulis mengemukakan kerangka pemikiran, terlebih dahulu dikemukakan pendekatan yang berfungsi untuk menjelaskan atau memahami fenomena yang berhubungan dengan penelitian yang penulis kerjakan.

Penulis mencoba untuk mengutip teori atau pendekatan para ahli yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan disimpulkan pada kerangka pemikiran yang mana tindakan ini dimaksudkan untuk memberi pondasi teoritis yang pada akhirnya akan dapat membantu dalam memformulasikan hipotesis, dimana hal ini dianggap penting karena teori-teori tersebut digunakan untuk dapat memahami fenomena-fenomena dalam hubungan internasional. Sehingga penulis mengambil beberapa pendapat yang dapat disajikan sebagai panduan dan acuan dalam menyusun skripsi ini.

Kerangka pemikiran ini merupakan argumentasi yang menjelaskan hubungan yang terdapat antar berbagai faktor yang saling berkaitan dan membentuk konstelasi permasalahannya, juga merupakan kajian teoritis berdasarkan pengujian secara empiris terhadap kesimpulan analisis teoritis.[[3]](#footnote-4)

 Untuk memahami pengertian **Hubungan Internasional**, maka penulis mengambil pengertian dari Suwardi Wiraatmajadalam bukunya*Pengantar Hubungan Internasional* sebagai berikut :

**“Hubungan Internasional adalah kajian yang mempelajari berbagai fenomena yang melintas batas negara yang dilakukan oleh apa yang disebut *state* actor dan non-state actor yang meliputi individu, bangsa dan kelompok bangsa dalam masyarakat dunia dan kekuasaan, tekanan-tekanan proses yang menentukan cara hidup, cara bertindak dan cara berfikir manusia.”**

 Terkait dengan ini juga K.J. Holsti dalam bukunya *International Politic*, mendefinisikan bahwa hubungan internasional sebagai berikut :

**“Hubungan Internasional adalah bentuk interaksi diantara masyarakat dunia dan negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau negara lebih lanjut dikatakan termasuk dari dalamnya pengkajian terhadap Politik Luar Negeri dan Rolling serta meliputi segala segi hubungan diantara negeri di dunia meliputi kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, pariwisata, komunikasi dan perkembangan nilai-nilai serta etika internasional.”**[[4]](#footnote-5)

Secara jelas, pengertian tersebut mengartikan hubungan internasional sebagai studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan-kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan relevan yang mengelilingi interaksi. Serta berbagai respon perilaku yang muncul diantara dan antar masyarakat yang terorganisir secara terpisah termasuk komponen-konponennya. Interaksi yang dilakukan tersebut tentu akan sangat berkaitan dengan politik, sosial, ekonomi, budaya dan interaksi lainnya diantara aktor-aktor negara dan aktor-aktor non-negara.[[5]](#footnote-6)

Hubungan Internasional merupakan hubungan antar bangsa atau interaksi manusia antarbangsa baik secara individu ataupun kelompok. Dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung dan dapat berupa persahabatan, persengketaan, permusuhana atau peperangan.

Selain itu, hubungan internasional juga merupakan hubungan yang dilakukan oleh bangsa- bangsa atau negara- negara atau merupakan sebuah atau suatu hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi yang melewati dan melampaui suatu batas-batas kenegaraan.

Hubungan Internasional yang menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama *(cooperation*), persaingan (*competition*) dan konflik (*conflict*) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional diantara negara-negara atau bangsa di dunia. Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya

Selanjutnya **Kepentingan nasional**adalah suatu hal yang mempengaruhi bahkan menjadi landasan dari tindakan aktor-aktor internasional. Untuk itu, dengan mengetahui kepentingan nasional suatu negara maka akan dapat dipahami asalan negara untuk melakukan tindakan tertentu. Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan kepentingan nasional sebagai :

 “ **...Tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan pada pembuat keputusan dari suatu negara dalam meruuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional suatu negara secara khas merupakan unsur-unsur yang membentuk kebutuhan negara paling vitaal, seperti pertahanan, kemanan militer, kesejahteraan ekonomi” (Perwita dan Yani 2006: 35)**

Sedangkan menurut Morgenthau (Maso ‘ed 1994 : 141) :

 “**Kemampuan minimum yang inheren dalam konsep kepentingan nasional adalah kelangsungan hidup. Kemampuan minumum negara bangsa ini, yakni melindungi identiutas fisik, politik dan kultural dari gangguan negara bangsa lain. Dalam pengertian lebih spesifik, negara bangsa harus bisa mempertahankan integrtitas teritorialnya, rezim ekonomi poilitknya serta memelihara norma-nroma etnis, relijius, linguistik dan sejarahnya.”**

Setelah kepentingan nasional akan dibahas mengenai **negara** yang merupakan integrasi dari kekuatan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara juga merupakan alat (agency) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan sgejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Sebagaimana negara didefiniskan oleh Roger H. Soltau :

**“Negara adalah agen (agency) atau kewewenangan (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat**.”[[6]](#footnote-7)

Negara merupakanaktorutamadalampanggunginternasional. Sebagaiaktorutama, Negaraberkewajibanmempertahankankepentingannasionalnyadalamkancahpolitikinternasional. Negara dalamkonteksinidiasumsikansebagaientitas yang bersifattunggaldanrasional. Maksudnyaadalahdalamtatarannegara, perbedaanpandanganpolitisi telahdiselesaikanhinggamenghasilkansatusuara. SedangkanNegaradianggaprasionalkarenamampumengkalkulasikanbagaimanacaramencapaikepentingan agar mendapathasilmaksimal. Seorangrealisjugabiasanyamemusatkanperhatianpadapotensikonflik yang ada di antaraktornegara, dalamrangkamemperhatikanataumenjagastabilitasinternasional, mengantisipasikemungkinankegagalanupayapenjagaanstabilitas, memperhitungkanmanfaatdaritindakanpaksaansebagaisalahsatucarapemecahanterhadapperselisihan, danmemberikanperlindunganterhadaptindakanpelanggaranwilayahperbatasan. Olehkarenaitu, *power* adalahkonsepkuncidalamhalini.[[7]](#footnote-8)Dasarnormatifrealismadalahkeamanannasional dankelangsunganhidupnegara: inimerupakannilai - nilai yang menggerakkandoktrinkaumrealisdankebijakanluarnegerikaumrealis.

Selanjutnya **region atau kawasan**. Region dapat diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan secara geografis. Selain itu juga negara-negara tersebut memiliki kemiripan sosiokultural. Secara politik terdapat kemiripan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional (Agung Perwita Anak dan Yanyan Mochamad Yani 2006: 106).

Regionalisme merujuk pada suatu proses pertumbuhan integrasi kemasyarakatan dalam suatu wilayah. Proses ini bersifat alami di mana negaranegara yang bertetangga dengan sendirinya melakukan serangkaian kerjasama guna memenuhi kebutuhan negara tersebut. *Transnational regionalism* dalam proses ini menyangkut arus mobilitas orang-orang, perkembangan jejaring (*network),* sosial yang kompleks dan melalui berbagai saluran di mana ide-ide, sikap politisi dan aliran-aliran pemikiran tersebar dari satu area ke area lain dengan mudah, serta terciptanya
suatu masyarakat sipil regional transnasioal ( Nuraeni, Deasy Silva dan Arifin Sudirman 2010:7). Dengan membentuk suatu organisasi regional atau menjadi anggota organisasi regional, negara-negara tersebut telah mengalang bentuk kerjasama intra-regional. Negara-negara tersebut telah melakukan distribusi kekuasaan di antara mereka untuk mencapai tujuan bersama.[[8]](#footnote-9)Integrasi internasional adalah suatu proses pencapaian kondisi
supranasional di mana urusan yang semula ditangani pemerintah nasional
beralih ke unit-unit politik yang lebih besar. Dengan kata lain integrasi
Internasioal merupakan proses dimana aktor-aktor politik nasional dari
berbagai negara diminta mengarahkan loyalitas, harapan, dan kegiatan politik
mereka ke instansi pusat dan lebih besar, yang lembaga-lembaganya memiliki
atau mengambil alih yurisdiksi yang semula berada di tangan negara bangsa (S
Nuraeni, Deasy Silva dan Arifin Sudirman 2010 : 102).Model integrasi kawasan pada hakikatnya dapat diklasifikasikan menjadi dua model, yakni berbentuk intergovernmentalisme atau supranasionalisme (Hurrel 2008: 56-90). Dalam konsep intergovernmentalisme, negara-negara yang bergabung tidaklah diperuntukkan untuk mendirikan supra-kedaulatan yang membawahi negara anggotanya. Dalam konsep supranasionalisme terjadi proses integrasi yang lebih dalam yang secara gradual akan membentuk rezim yang lebih tinggi, di mana para negara anggota secara sukarela tunduk pada entitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain konsep intergovernmentalisme bernuansa neorealis, sedangkan supranasionalisme lebih ke arah paradigma neoliberal. Seperti kita ketahui paradigma realis dalam hubungan internasional menyikapi regionalisme sebagai suatu kerjasama yang rapuh karena setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda. Sebaliknya, kaum liberal berkeyakinan bahwa kondisi global kontemporer tidak memungkinkan suatu negara untuk mengatasi problem sendiri*,* sehingga regionalisme telah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dielakkan (Nye dan Keohane 2005: 23-36). Memasuki tahun 2010, kawasan Mediterania Selatan mengalami krisis politik. Negara-negara Mediterania Selatan merupakan negara-negara yang berbatasan langsung dengan laut Mediterania, dan secara geografis terletak di Afrika Utara seperti Libya, Tunisia dan kawasan Timur Tengah seperti Mesir, dan Suriah (Asgar Bixby 1993: xi-xiii). Konflik di kawasan Mediterania Selatan bermula dari konflik internal yang terjadi di Tunisia. Masyarakat Tunisia menginginkan kebebasan dan kemakmuran ekonomi, selain itu juga ingin merobohkan sistem pemerintahan
otoriter yang sudah dijalankan selama 23 tahun oleh pemerintahan Ben Ali. Konflik inilah yang menjadi titik awal dari konflik yang terjadi negara-negara Mediterania Selatan seperti Mesir, Libya, dan Tunisia yang juga menginginkan sistem pemerintah yang lebih baik. Gelombang demokratisasi yang terjadi di wilayah tersebut.[[9]](#footnote-10)

Kemudian **demokrasi**  yang secara etimologi demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratein. Demos berarti “rakyat”, sedangkan kratein dapat diartikan sebagai pemerintahan. Jadi demokrasi dapat diterjemahkan sebagai “pemerintahan rakyat”.

Dalam hal ini demokrasi merujuk pada suatu usaha atau proses pemdemokrasian seluruh lapisan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Francis Fukuyama dalam bukunya The End of History and the Last Man mengatakan bahwa : “ ...ia (demokrasi) menaklukkan ideologi-ideologi pesaingnya seperti monarki turun-temurun, fasisme dan baru-baru ini komunisme.”

 Demikian pula dengan Samuel P. Huntington dalam The Third Wave yang menegaskan bahwa kejatuhan komunisme dunia sebagai momentum kelahiran kembali demokrasi secara utuh. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan kenyataan yang terjadi di Tunisia, Mesir dan Libya dimana kekuasaan kelompok militer lebih mendominasi dan tidak ada kesan demokrasi tersirat sedikitpun disana. Hal tersebutlah yang menjadi penyebab Revolusi Tunisia 2010, revolusi Mesir 2011 dan revolusi Libya 2011 lalu, dimana terjadi secara berturut-turut.

Sementara itu, Robert A. Dahl mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Yakni, sistem politik yang sepenuhnya responsif terhadap semua warga Negara. Agar suatu Negara dapat diperintah secara demokratis, menurut Dahl diperlukan dua syarat utama, yakni: pertama, militer dan polisi haru sberada di bawah pengawasan sipil; kedua, sipil yang mengendalikan militeritu sendiri harus tunduk pada proses demokrasi. Sehingga dengan demikian, kekuatan persuasif lebih diutamakan dari pada kekuatan koersif. Selain itu, diperlukan suatu tatanan yang disebut sebagai poliarki, yakni suatu tatanan politik yang pada tingkatnya paling umum dibedakan menjadi dua ciri: kewarganegaraan diperluas sampai mencakup bagian yang relatif tinggi dari dewasa, dan hak-hak kewarganegaraan mencakup kesempatan untuk menentang dan memberhentikan para pejabat tinggi dalam pemerintahan dengan melalui pemberian suara. Poliark juga merupakan suatu tatanan politik yang dibedakan oleh tujuh lembaga: para pejabat yang dipilih; pemilu yang bebas dan adil; hak suara yang inklusif; hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan; kebebasan menyatakan pendapat; informasi alternatif; serta otonomi asosiasional.

Suatu Negara dapat dikatakans ebagai Negara demokrasi jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi

2. Kebebasan rakyat untuk berekspresi

3. Hak memilih

4. Seluruh rakyat memilikihak yang setara untuk duduk di jabatan pemerintahan

5. Hak bagi pemimpin politik untuk bersaing mendapat dukungan termasuk dalam bentuk suara rakyat dalam pemilu

6. Ketersediaan sumber informasi yang luas

7. Pemilu bebas dan adil

8. Institusi yang menetapkan kebijakan pemerintah mendasarkan keputusannya pada pemungutan suara dan cara pengungkapan aspirasi-aspirasi lainnya.

Semua persyaratan di atas merupakan bentuk Negara demokrasi yang seharusnya menurut Robert A. Dahl. Ketika dilihat dari konsep demokrasi yang dikemukakan oleh Dahl ini demokrasi di Tunisia dan Mesir ini belum memenuhi persyratan itu semua untuk dikatakan sebagai Negara yang demokratis dalam versi Robert A. Dahl. Maka tidak mengherankan jika apa yang terjadi di Tunisia dan Mesir pada revolusi 18 Desember &25 Januari lalu banyak terbantu oleh media massa karena sistem otoritarianisme yang diterapkan oleh rezim Mubarak tidak memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk berpendapat. Dan media merupakan satu-satunya media yang dapat mereka jadikan sebagai tempat menumpahkan segala tindak-tanduk pemerintah yang tidak pro rakyat.

Berikutnya**demokratisasi** ialah sebuah proses atau upaya suatu bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara. Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupun secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Demokrasi juga diartikan sebagai simbol kedaulatan rakyat. Pemimpin yang dipilih secara demokratis, ia tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan cita-cita dan gagasan rakyat pemilihnya itu. Sebaliknya, ia justru bertanggung jawab untuk membimbing rakyat sesuai dengan aturan-aturan hukum .

Demokrasi merupakan kunci tersendiri dalam kaitannya dengan bidang ilmu politik. Indikator perkembangan suatu negara bisa dilihat dari berjalannya demokrasi di negara tersebut. Demokrasi meningkatkan kebebasan yang tidak dapat dilakukan oleh alternatif lain, yakni kebebasan penentuan nasib sendiri secara individual maupun bersama serta kebebasan dalam tingkat otonomi moral. Demokrasi menjadi hal yang sangat vital terutama dalam pembagian kekuasaan di suatu negara. Para pemegang kekuasaan dituntut agar menggunakan kekuasaannya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang bertanggung jawab merupakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan nilai demokrasi. Mayoritas negara-negara Arab di Timur Tengah masih berada dibawah bayang-bayang otoritarianisme atau semi-otoritarianisme. Karakter otoritarian adalah mengekang kebebasan individu. Sementara kebebasan individu merupakan isu utama yang dibawa oleh gerakan demokrasi.

Demokrasi juga terkait erat dengan HAM. Sebuah negara yang mengklaim dirinya demokrasi, harus menghormati HAM. Dengan mengangkat masalah HAM, apa yang terjadi di Tunisia berbeda dengan konsep demokrasi yang berkaitan dengan HAM. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis menggunakan konsep demokrasi dan demokratisasi sebagai bahan penelitian dalam menjelaskan penyebab terjadinya demokratisasi di Tunisia. Demokratisasi yang sukses terjadi di suatu negeri dan hal ini kemudian mendorong demokratisasi di negeri-negeri lain, baik karena negeri-negeri itu tampaknya menghadapi masalah masalah yang sama, atau karena demokratisasi yang sukses di tempat lain mengesankan bahwa demokratisasi dapat menjadi obat bagi segala masalah yang mereka hadapi, atau karena negeri yang telah mengalami demokratisasi itu kuat dan dipandang sebagai sebuah model politik dan budaya.

Dalam kajian mereka tentang *Crisis, Choice, and Change,* Almond dan Mundt menemukan bahwa di antara beberapa faktor lingkungan penyebab yang mereka analisis, faktor efek demonstrasi ini cukup penting. Kajian statistik tentang kudeta dan fenomena politik yang lain telah menunjukan adanya pola penularan sekurang-kurangnya pada beberapa keadaan.Demokratisasi ialah sebuah proses atau upaya suatu bangsa untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara. Demokratisasi adalah suatu perubahan baik itu perlahan maupun secara cepat kearah demokrasi. Demokratisasi ini menjadi tuntutan global yang tidak bisa dihentikan. Demokrasi sendiri menurut dari bahasanya ialah pemerintahan oleh rakyat.

Banyak yang mengatakan konsep demokrasi ialah sebuah konsep pemerintahan yang dibangun oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi juga diartikan sebagai simbol kedaulatan rakyat. Pemimpin yang dipilih secara demokratis, ia tidak bertanggung jawab untuk melaksanakan cita-cita dan gagasan rakyat pemilihnya itu. Demokrasi merupakan kunci tersendiri dalam kaitannya dengan bidang ilmu politik. Indikator perkembangan.Suatu negara bisa dilihat dari berjalannya demokrasi di negara tersebut. Demokrasi meningkatkan kebebasan yang tidak dapat dilakukan oleh alternatif lain, yakni kebebasan penentuan nasib sendiri secara individual maupun bersama serta kebebasan dalam tingkat otonomi moral. Demokrasi menjadi hal yang sangat vital terutama dalam pembagian kekuasaan di suatu negara. Para pemegang kekuasaan dituntut agar menggunakan kekuasaannya untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang bertanggung jawab merupakan sebuah kewajiban untuk melaksanakan nilai demokrasi.

Mayoritas negara-negara Arab di Timur Tengah masih berada dibawah bayang-bayang otoritarianisme atau semi-otoritarianisme. Karakter otoritarian adalah mengekang kebebasan individu. Sementara kebebasan individu merupakan isu utama yang dibawa oleh gerakan demokrasi. Demokrasi juga terkait erat dengan HAM. Sebuah negara yang mengklaim dirinya demokrasi, harus menghormati HAM. Dengan mengangkat masalah HAM, apa yang terjadi di Tunisia berbeda dengan konsep demokrasi yang berkaitan dengan HAM. Menurut Samuel Huntington, Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara. Sistem politik yang demokratis tidak hanya terdapat di zaman modern. Pada banyak daerah di dunia ini, telah berabad-abad lamanya para pemimpin suku selalu dipilih, dan di beberapa tempat lembaga politik demokratis sudah lama terdapat di tingkat desa.

 Di samping itu, konsep demokrasi tentu saja sudah dikenal di zaman kuno. Tetapi, demokrasi orang Yunani dan orang Romawi tidak mengikut-sertakan wanita, budak, dan sering pula kategori-kategori kelompok yang lain seperti penduduk asing, dalam kehidupan politik. Dalam prakteknya, tanggung jawab badan-badan yang berkuasa kepada publik yang dibatasi ini pun sering terbatas. Bentuk pemerintahan bukanlah hal penting satu-satunya mengenai suatu negeri, dan barangkali tidak pula merupakan hal yang paling penting. Perbedaan yang jelas antara ketertiban dengan anarki lebih penting. Perbedaan yang jelas antara ketertiban dengan anarki lebih penting daripada perbedaan yang jelas antara demokrasi dengan kediktatoran. Namun perbedaan itu juga amat penting karena beberapa alasan.

Pertama, demokrasi politik berkaitan erat dengan kebebasan individu. Negara-negara demokrasi dapat dan pernah melanggar hak-hak dan kebebasan individu, dan sebuah negeri otoriter yang diatur dengan baik boleh jadi memberikan tingkat keamanan dan ketertiban yang tinggi kepada para warga negaranya. Akan tetapi secara kesuluruhan korelasi antara eksistensi demokrasi dengan eksistensi kebebasan individu adalah sangat tinggi. Bahkan, adanya sejumlah kebebasan individu merupakan komponen esensisal dari demokrasi. Sebaliknya, pengaruh jangka panjang dari berjalannya proses politik yang demokratis barangkali adalah memperluas dan memperdalam kebebasan individu. Dalam pengertian tertentu, kebebasan merupakan keutamaan yang khas dari demokrasi. Apabila kita peduli terhadap kebebasan sebagai suatu nilai sosial yang tertinggi, maka kita seharusnya juga peduli akan nasib demokrasi. Kedua, stabilitas politik dan bentuk pemerintahan, sebagaimana telah dikumukakan, merupakan dua variabel yang berbeda. Namun, keduanya juga saling berkaitan.

 Negara demokrasi sering sulit dikendalikan, tetapi secara politik ia jarang menggunakan kekerasan. Di dunia modern, dibandingkan dengan sistem nondemokratis, sistem demokrasi cenderung kurang terpengaruh oleh kekerasan sipil. Pemerintah yang demokratis jauh lebih sedikit menggunakan kekerasan terhadap warga negaranya ketimbang pemerintah otoriter. Negara-negara demokratis juga menyediakan saluran-saluran yang telah disetujui untuk menyatakan perbedaan pendapat dan oposisi di sistem itu. Dengan demikian, baik pemerintah maupun oposisi tidak mempunyai banyak rangsangan untuk menggunakan kekerasan terhadap satu sama lain. Demokrasi juga mempunyai andil bagi stabilitas dengan menyediakan kesempatan yang regular untuk mengganti para pemimpin politik dan mengubah kebijakan Negara.

Dalam negeri demokrasi, perubahan dramatis jarang terjadi dalam satu malam; perubahan itu hampir selalu bersifat moderat dan sedikit demi sedikit. Sistem demokrasi jauh lebih kebal terhadap pergolakan besar revolusioner ketimbang sistem otoriter. Seperti pernah dikatakan Che Guevara, revolusi yang ditujukan terhadap sebuah pemerintah yang telah memperoleh kekuasannya melalui suatu bentuk pemilihan umum, curang atau tidak curang, dan paling tidak tetap tampak sah secara konstitusional, tidak akan berhasil. Ketiga, menyebarnya demokrasi berimplikasi bagi hubungan internasional. Sepanjang sejarahnya, negeri-negeri demokrasi sama halnya dengan negeri-negeri otoriter, telah sering melancarkan peperangan. Negeri-negeri otoriter telah memerangi negeri-negeri demokrasi, dan telah sering memerangi di antara sesamanya. Namun, sejak awal abad ke-19 hingga tahun 1990, negeri-negeri demokrasi tidak memerangi, dengan perkecualian yang tak berarti atau bersifat formal, negeri demokrasi yang lain. Selama fenomena ini berlanjut, tersebarnya demokrasi di dunia berarti perluasan zona perdamaian di dunia.

 Berdasarkan pengalaman masa lalu, dapat dikatakan bahwa dunia yang sebagian besar berisikan negeri-negeri demokrasi cenderung relatif bebas dari tindak kekerasan internasional. Ketika merenungkan keanekaragaman masyarakat yang memiliki pemerintahan demokratis, Myron Weiner menyimpulkan bahwa untuk menjelaskan demokratisasi kita harus memperhatikan strategi-strategi yang tersedia bagi orang-orang yang menghendaki revolusi demokratis. Nasehat ini secara tepat menekankan peranan yang menentukan dari kepemimpinan politik dan kemahiran politik dalam mewujudkan demokrasi. Namun hal ini tidak seharusnya menyebabkan kita menolak sama sekali faktor-faktor sosial, ekonomi, dan kultural yang lebih luas dan kontesktual dalam dalam menjelaskan perkembangan demokrasi. Ada sebuah rantai atau corong dari hubungan kausal dan semua faktor-faktor internasional, faktor politik, sering kali secara bertentangan, berfungsi mendorong terciptanya demokrasi atau mempertahankan otoritasrisme. Dengan sedikit sekali kekecualian, kebijakankebijakan yang diambil pemerintah-pemerintah otoriter dalam menghadapi krisis minyak dan hutang, sering memperburuk situasi ekonomi, menimbulkan stagnansi, depresi, inflasi, laju pertumbuhan yang rendah atau negatif, bertambahnya jumlah hutang, atau kombinasi dari kondisi-kondisi ini, sehingga lebih memperlemah lagi legitimasi rezim itu. Legitimasi rezim otoriter juga terkikis apabila rezim itu benar-benar mewujudkan janjinya. Ketika tujuan tercapai, rezim tersebut kehilangan tujuannya. Hal ini mengurangi alasan bagi publik untuk mendukung rezim itu, mengingat adanya biaya-biaya lain yang terkait dengan rezim itu.

Tercapainya tujuan itu meningatkan ketidakpastian dan konflik di dalam rezim mengenai tujuan-tujuan baru apa yang seharusnya mereka kejar. Menghadapi erosi legitimasi ini, pemimpin-pemimpin otoriter bisa dan telah memberikan respon melalui satu atau lebih cara dari lima cara yang ada. *Pertama*, mereka bisa saja menolak untuk mengakui kelemahan mereka yang semakin bertambah dengan harapan atau keyakinan bahwa mereka, bagaimanapun juga, akan tetap berkuasa. Kelemahan mekanisme umpan-balik pada sebagian besar rezim otoriter dan keyakinan yang keliru dari banyak diktator perorangan memperkuat kecenderungan ini. Namun, tidak satupun harapan atau keyakinan ini dipastikan dapat terwujud. *Kedua*, rezim itu bisa berupaya untuk bertahan dengan menjadi semakin represif, dengan, dalam kenyataannya menggantikan kewajiban yang sudah habis dengan kepatuhan yang dipaksakan. Ini sering mensyaratkan pergeseran kepemimpinan rezim, seperti yang terjadi di Yunani 1973, di Argentina 1981, dan di Cina 1989. Apabila pemimpin-pemimpin rezim itu pada pokoknya sepakat dengan jalan semacam itu, mereka mungkin dapat menunda konsekuensi dari legitimasi mereka yang berkurang itu secara signifikan.*Ketiga*, menciptakan konflik dengan negeri asing dan berupaya memulihkan legitimasi dengan memanfaatkan rasa kebangsaan.

 Upaya pemimpin-pemimpin otoriter untuk memperkuat legitimasi yang sedang melemah melaui perang melawan negeri lain menghadapi sebuah rintangan yang inheren. Angkatan bersenjata dari sebuah rezim militer yang terlibat dalam percaturan politik mungkin tidak mempuyai struktur komando yang efektif, dan cenderung semakin terpolitisir dengan semakin lamanya rezim itu berkuasa. Dilain pihak, dalam sebuah pemerintahan diktator perorangan, pihak militer tidak boleh terjun dalam politik, tetapi politik telah merasuk ke dalam tubuh militer sebab ketakutan utama sang diktator adalah terjadinya kudeta. Demikianlah, dalam pengangkatan jabatan, orang-orang yang tidak kompeten dan para budak lebih disukai. Akibatnya, baik rezim militer maupun kediktatoran perorangan cenderung memiliki angkatan bersenjata yang kurang professional dan kurang efektif dalam perang. *Keempat,* berupaya menciptakan legitimasi yang mirip dengan legitimasi demokrasi untuk rezim mereka. Kebanyakan rezim otoriter yang berkuasa pada awal dasawarsa 1970 menyatakan bahwa pada waktunya nanti mereka akan memulihkan demokrasi. Manakala legitimasi kinerja rezim itu merosot, mereka semakin terdesak untuk menepati janji dan terpaksa berupaya melegitimasi kembali eksistensi mereka melaui pemilihan umum. Dalam beberapa kasus, para pemimpin itu agaknya yakin bahwa mereka dapat memenangkan pemilihan umum secara adil. Namun, hal itu hampir tidak pernah terwujud, terutama apabila oposisi berhasil mencapai tingkat persatuan yang minimal. Dilema kinerja dengan demikian digantikan oleh dilema pemilihan.*Kelima*, para pemimpin otoriter itu dapat menghadapi kesulitan dengan berani dan memimpin pengakhiran pemerintahan otoriter serta memulai suatu sistem demokrasi. Hal ini sering terjadi namun hampir selalu mempersyaratkan perubahan kepemimpinan di dalam sistem otoriter itu lebih dulu. Legitimasi yang merosot biasanya menimbulkan keragu-raguan didalam pikiran para pemimpin otoriter dan perpecahan di kalangan pemimpin mengenai reaksi manakah yang harus dipilih. Kemudian, keragu-raguan, ketidakpastian, dan fluktuasi dalam tindakan yang dilibatkannya lebih memerotkan lagi legitimasi rezim itu dan mendorong kelompokkelompok politik untuk memikirkan pengganti rezim itu.

 Demokratisasi yang sukses terjadi di suatu negeri dan hal ini kemudian mendorong demokratisasi di negeri-negeri lain, baik karena negeri-negeri itu tampaknya menghadapi masalah masalah yang sama, atau karena demokratisasi yang sukses di tempat lain mengesankan bahwa demokratisasi dapat menjadi obat bagi segala masalah yang mereka hadapi, atau karena negeri yang telah mengalami demokratisasi itu kuat dan dipandang sebagai sebuah model politik dan budaya.

Berikutnya **Revolusi**adalah perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Dalam sebuah revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau dengan kekerasan. Revolusi Tunisia, Mesir dan Libya merupakan akumulasi kekecewaan publik yang selama puluhan tahun dikekang oleh Rezim Ben Ali, Mubarak dan Kadafi.

Dalam hal ini, Guilllermo O’Donnel dan Phillipe C. Schmitter menyatakan bahwa “transisi” adalah interval (selang waktu) Antara satu rezim politik dan rezim yang lain. Transisi dibatasi oleh dimulainya proses perpecahan rezim *authoritarian* oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter atau kemunculan beberapa alternative revolusioner.

Selama masa transisi, bila memang ada aturan-aturan yang efektif cenderung berada dalam genggaman pemerintah otoriter.[[10]](#footnote-11) Di Tunisia, Mesir dan Libya transisi dari otoriterisme ke demokrasi melibatkan proses yang sangat panjang dan kompleks. Banyak pendukung rezim lama masih tetap bertahan, pada saat yang sama kekuatan reformasi tidak terkonsolidasi dengan baik dan bahkan sebaliknya, kecurigaan timbal balikpun kian meningkat ditambah lagi dengan tidak adanya figur-figur sentral yang dapat membuat berbagai kalangan tersebut dapat menumbuhkan rasa saling percaya sedikit demi sedikit.[[11]](#footnote-12) Kini waktunya bagi rakyat Tunisia, Mesir dan Libya untuk mendapat haknya yang sah untuk menentukan masa depannya.

Menurut Dumairy (1966) sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dumairy berpendapat bahwa sebagai bagian dari sistem kehidupan, sistem ekonomi disuatu negara berkaitan erat dengan sistem-sistem sosial lain yang berlangsung dalam masyarakat dan sistem ideologi politik di negara tersebut. Di Tunisia, Mesir dan Libya sistem ekonomi di negara tersebut tidak mencerminkan keadilan. Terjadi kesenjangan yang sangat terlihat antara kelompok elit dengan mayoritas masyarakat miskin, dikarenakan korupsi terjadi dimana-mana dan banyaknya pengangguran.

Revolusi merupakan bagian dari **konflik**. Konflikterjadi dimana biasanya kelompok atau individu berusaha untuk mencapai suatu tujuannya tersebut dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan.

**“Konflik adalah tindakan yang mengarah pada pemakaian kekerasan yang terorganisir muncul akibat dari posisi yang sering bertentangan, sikap bermusuhan dan tindakan militer atau diplomatik dari beberapa kelompok tertentu atau suatu permasalahan kelompok yang terlibat dalam konflik biasanya tidak selalu bertentangan dengan pemerintah bangsa dan negara.”[[12]](#footnote-13)**

Dari berbagai konflik atau perselisihan yang terjadi, memiliki teori mengenai penyebab perang atau sebab-sebab konflik.

1. **Teori Hubungan Masyarakat**
2. **Teori Negosiasi**
3. **Teori Kebutuhan Manusia**
4. **Teori Identitas**
5. **Teori Kesalahpahaman antar Budaya**
6. **Teori Transformasi Konflik[[13]](#footnote-14)**

Dalam hal ini pelanggaran HAM terjadi dimana-mana, adapun mengenai Hak Asasi Manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa HAM merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan. Sebaliknya, John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Menurutnya, yang harus diserahkan yaitu hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. Setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan. Yaitu *life, liberty*, serta *estate*. Maka sangatlah logis jika tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada masing-masing individu yang berada di negara tersebut. Dasar pemikiran John Locke inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan HAM.[[14]](#footnote-15) Pelanggaran HAM di Mesir menurut Dewan Nasional HAM Mesir dalam laporan tahunannya mengungkap tentang perlakuan buruk terhadap mereka yang dicekal di kantor polisi, penyiksaan terhadap para tahanan, penangkapan aktivis politik dan penulis Web blog, serta peradilan warga sipil di mahkamah militer merupakan sederet contoh kasus pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Mesir. Laporan itu juga mengatakan bahwa penyiksaan terorganisir di penjara-penjara Mesir telah berubah menjadi hal yang wajar.kini telah tercatat telah sekitar 40 lembaga internasional pembela HAM mendesak Kairo untuk menghormati prinsip-prinsip HAM dan menghentikan aksi penyiksaan terhadap tahanan.[[15]](#footnote-16)

 Definisi HAM menurut Syafrudin yaitu sebagai berikut :

 **“Hal ini menarik perhatian internasional sebagai salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), semakin maraknya pelanggaran HAM mengakibatkan nilai universal HAM mengkristal menjadi isu global. HAM tidak lagi dilihat sebagai perwujudan paham individualism dan liberalisasi, namun lebih dipahami secara manusiawi sebagai hak-hak yang melekat dengan harkat dan hakikat kemanusiaan kita, apapun latar belakang ras, etnik, warna kulit, jenis kelamin, ataupun pekerjaan kita.”[[16]](#footnote-17)**

Sedangkan menurut David P. Forsythe kategori HAM sebagai berikut :

**“HAM secara tradisional dibagi menjadi 3 kategori, yaitu HAM generasi pertama dengan kebebasan sipil dan politik. Generasi kedua meliputi hal ekonomi, sosial dan budaya. Generasi ketiga adalah hak solidaritas untuk perdamaian, pembangunan, lingkungan yang sehat, warisan yang sama, dan bantuan kemanusiaan.”[[17]](#footnote-18)**

Dalam hal ini banyak kejahatan yang telah dilakukan oleh Rezim Ben Ali, Mubarak dan Kadafi dengan pemerintahannya yang merugikan rakyat Tunisia, Mesir dan Libya.

Pada teoriRealitas Ortodok, dalam hubungan internasional, negara-negara dianalogikan dengan bola-bola bilyar yang interaksi-interaksinya dapat dengan baik dipahami sebagai konsekuensi dari hierarki kekuasan yang lama.Teori ini diawali oleh karya E. H Carr, *The Twenty Years Crisis*pada tahun 1939. Carr mencoba untuk mengkritik beberapa kesalahan dalam teori liberal internasionalismeyang muncul sebelumnya sebagai sebuah tanggapan atas Perang Dunia Pertama. Liberalisme mengatakan bahwa masyarakat tidak ingin berperang dan kemudian hanya pemerintah otoriterlah yang membuat peperangan antar negara terjadi.

Dan yang terakhir adalah **efek domino,** yang mana efek domino inisecara singkat menjelaskan bahwa peristiwa yang terjadi di suatu negara bisa juga terjadi pada negara lainnya yang memiliki kesamaan karakter. Revolusi yang terjadi di Tunisia, Mesir, dan Libya merupakan efek domino, karena secara geografis negara-negara tersebut bertetangga.

Efek domino merupakan suatu istilahyang sudah lama diperkenalkan olehpara ahli strategi internasional untukmenggambarkan hubungan antara suatuideologi dan pengaruhnya, suatu agama,budaya, kebijakan politik dan moneter maupun hubungan antara suatu negarabangsadengan mengambil suatu fenomena susun-bangun kartu domino, dan apabila salah satu kartu itu jatuh baik secarasengaja atau lemah secara alamiah, makaseluruh rangkaian kartu domino tersebutakan jatuh secara berurutan.[[18]](#footnote-19)

Berdasarkan urain diatas, maka dapat ditarik beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Proses demokratisasi di Tunisia berjalan lambat, faktor utamanya adalah rezim yang berkuasa menutup rapat-rapat semua celah yang memungkinkan negaranya menuju ke arah demokrasi, seperti pemberangusan media masa, penyitaan aset ormas-ormas dan institusi sosial. Terjadinya revolusi Tunisia tahun 2010 merupakan proses untuk mempercepat terwujudnya demokrasi di negara tersebut.
2. Sebenarnya Tunisia sebelum revolusi sudah merupakan negara arab yang paling demokratis, setidaknya semua syarat demokrasi sudah tertuang di dalam undang-undang atau konstitusi negara tersebut, namun disayangkan kalau ternyata semuanya hanya tertulis di atas kertas. Pemerintah yang berkuasa, sebagaimana negara Timur Tengah lainnya pada umumnya memilih untuk bersikap otoriter.
3. Kondisi sosial ekonomi politik yang tidak jauh berbeda antara Tunisia, Mesir, Libya, Suriah dan negara-negara arab spring lainnya, menjadi faktor utama terjadinya peristiwa revolusi.
4. **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran dan permasalahan di atas, maka penulis mencoba membuat dan merumuskan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai dugaan awal atau jawaban sementara terhadap permasalahan, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

“Perubahan kondisi poliik Negara Tnuisia mempengaruhi kondisi politik dinegara-negara Timur Tengah lainnya”.

1. **Operasionalisasi Variabel dan Indikator (Konsep, Teoritik, Empirik, Analisis)**

Untuk membantu menganalisa dan menjelaskan hipotesis diatas, maka penulis membuat analisa operasional dan variabel indikator sebagai berikut:

1. **Tabel Variabel dan Indikator**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Variabel dalam Hipotesis | Indikator | Verifikasi |
| Variabel Bebas:Revolusi yang terjadi di Tunisia | 1. Tumbangnya Rezim Ben Ali
2. Protes Masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Tunisia
 | 1. Arab spring di Tunisa terjadi bermula pada Desember 2010 ketika seorang pedagang bernama Bouazizi melakukan aksi bakar diri sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan rezim yang berkuaa. Aksi protes yang dilakukan Bouazizi pada akhirnya memicu amarah rakyat diseluruh seantero negari kemudian menjelma menjadi gerakan revolusi menuntut mundurnya sang presiden yang bernama Ben Ali. Ben Ali menajabat sebagai presiden selama 23tahun[[19]](#footnote-20)
2. Ratusan demonstran turun kejalan di Tunis, Ibukota Tunisa. Mereka menyuarakan agar presidennya segara mundur dari jabatannya. Pada masa pemerintahan ben Ali sistem multi partai sudah berlaku di Tunisa, namun otoriatarianisme tetap mencolok dalam setiap rezim yang mendeskriditkan lawan politiknya.[[20]](#footnote-21)
 |
| Variabel Terikat:Mempengaruhi timbulnya proses demokratisasi di negara-negara Timur Tengah | 1. Terjadinya usaha revolusi dari negeri tetangga.
2. Perubahan kebijakan pemerintahan yang pro demokrasi.
 | 1. Barangkali aksi bouazizi tidak mengira akan mampu menumbangkan rezim 2 negara tetangganya. Negeri-negeri arab sekitarnya memanas , Mesir negara pertama yang kemudian terinspirasi oleh Tunisia untuk melakukan demo yang pada percobaan pertamanya hanya ratusan orang dan mengalami kegagalan, namun akhirnya Husni mubarak pun tumbang. Disusul oleh negeri tetangga mesir, Libia, pada bulan Februar. Muammar Qadhafi tewas ditangan pasukan oposisi. Suriah menyusul kemudian, Yaman pun ikut memanas. Rakyat Bahrain sempat melakukan percobaan kudeta terhadap pemimpinnya namun usaha mereka tidak berhasil.[[21]](#footnote-22)
2. Pasca keberhasilan revolusi yang terjadi di dunia arab, khususnya Tunisia, dan Mesir yang langsung menyelenggarakan pemilu setelah lengsernya rezim. Di Tunisia Partai An-Nahdhah pimpinan Rasyid Al Ganushi, tokoh yang sempat diasingkan oleh Ben Ali kembali ke Tunisia dan mendapat suara yang cukup banyak untuk duduk di parlemen.

Pasca pemilu, pemerintahan baru yang didomonasi kelompok Islam memilih untuk mengedepankan agenda reformasi di berbagai bidang terutama ekonomi. Partai Kebebasan dan Keadilan di Mesir misalnya, mendukung terciptanya pasar bebas dan akan bekerjasama berbagai pihak dalam rangka mengembangkan jaringan bisnis dan pariwisata Timur Tengah. Disamping itu, petinggi partai An-Nahdhah Tunisia yang menjadi perdana menteri, Hamadi Jebali menyatakan pemerintahan baru yang dipimpinnya akan fokus pada pemulihan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, membangun kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain dikawasan Timur Tengah dan Eropa. Sementara Abdelilah Benkirane sebagai pemimpin baru Maroko berjanji akan meningkatkan ekonomi negaranya termasuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, meningkatkan upah bagi buruh, menciptakan stabilitas nasional. Demikian halnya pemerintahan baru Libya pimpinan Abdurrahim Al-Kib menyatakan siap membentuk negara demokratis dan akan bekerjasama dengan Uni Afrika dan negara-negara Arab lainnya untuk memulihkan perekonomian negara terutama dalam melanjutkan program-program *African Economic Community* (AEC).[[22]](#footnote-23) |

1. **Skema Kerangka Teoritis**

Revolusi Dunia Arab

Revolusi Tunisia

Proses demokratisasi

Hasil penelitian

1. **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

Tipe Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-kualitatif yaitu mengumpulkan, menyusun, menginterprestasikan data kemudian menganalisa fenomena demokratisasi di Tunisia sehingga berpengaruh terhadap negara-negara Arab Timur Tengah lainnya..

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dapatkan bukan berupa numeric atau bukan data yang berbentuk angka. Tapi dengan studi pustaka atau *library research,* yaitu melalui penelaahan terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen, surat kabar, dokumen, artikel, internet dan makalah.

1. **Lokasi dan Lama Penelitian**
2. **Lokasi Penelitian**
3. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan
4. Perpustakaan PT Dirgantara Indonesia Masjid Habiburrahman
5. **Lama Penelitian**

Lama penelitian dilakukan selama 6 bulan.

1. **Sistematika Penulisan**

Secara Umum, penulisan skrispsi ini terbagi dalam lima bab. Pembahasan yang terkandung dalam bab satu dengan bab – bab lainnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Sehingga pada akhirnya akan membentuk suatu karya tulis yang runtut dan sistematis. Adapun sistematika penuilisannya adalah sebagai berikut :

**BAB I** Dalam Bab I ini membahas tentang pendahuluan, berisikan sub – sub yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian, lokasi dan table lamanya penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada Bab II ini akan membahas uraian atau informasi mengenai tema yang dijadikan variable bebas. Yaitu Latar Belakang terjadinya Revolusi Tunisia lalu berkembang menjadi Arab Spring atau Revolusi Melati.

**BAB III** Dalam Bab III ini berisi uraian atau informasi mengenai masalah yang menjadi variable terikat yaitu konsep yang hendak dijelaskan kejadiannya dan terjadi akibat dari variable lain. Dalam penyusunan skripsi ini yang menjadi variable terikat adalah pengaruh demokratisasi terhadap negara-negara Timur Tengah. Maka, hal – hal yang akan dijelaskan dalam bab ini adalah Demokratisasi Tunisia, mulai dari pembahasan kondisi Tunisia pra dan pasca demokrasi, kondisi negara-negara Timur Tengah pra dan pasca demokratisasi, dan faktor yang mempengaruhi timbulnya demokratisasi di Tunisia.

**BAB IV** Dalam Bab IV ini berisi pembahasan, menguraikan serta menjawab hipotesis dan identifikasi masalah yang dideskripsikan dalam data.

**BAB V** Dalam Bab V ini akan memaparkan beberapakesimpulan atau hasil yang penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**BAB II**

**REVOLUSI YANG TERJADI DI TUNISIA**

1. **Revolusi Tunisia**

Krisis berkepanjangan yang dialami Tunisia telah mendorong salah seorang warga negaranya untuk berdemonstrasi sendirian di depan gedung gubernur. Jumat 17 Desember, seorang lelaki bernama Muhammad Bouazizi yang berkerja sebagai pedagang asongan untuk mengeluhkan gerobak sayurannya yang disita oleh aparat ketika terjadi razia. Penyitaan itu terjadi ketika Boazizi menjajakkan barang dagangannya ditengah-tengah kondisi yang serba susah. Padahal Boazizi adalah pemegang ijazah S1. Kisah tentang Boazizi biasa terjadi dan mungkin akan terus terjadi dinegara-negara yang tengah mengalami krisis. Ada banyak pedagang asongan di negeri arab lain yang meminta hak serupa ketika gerobak mereka disita, namun kejadiannya selalu berakhir sama, para pedagang tersebut “dipukul mundur” dan para pejabat menolak untuk menemui mereka.[[23]](#footnote-24)

Bouazizi sebagai seorang pemuda yang dilahirkan di daerah Bouzid pada tanggal 29 Maret 1984 dengan sembilan saudara, adalah salah satu dari pedagang tersebut yang memberanikan diri untuk mendatangi kantor gubernur provinsi Bouzid untuk meminta haknya dikembalikan, namun seperti yang telah diprediksi, protesnya sama sekali tidak didengar. Hal ini kemudian mendorongnya untuk melakukan usaha bunuh diri dengan membakar diri. Melihat kejadian ini, *security* gedung provinsi malah menertawakan, tanpa memberikan pertolongan.

Boazizi Kemudian dilarikan ke rumah sakit dengan kondisi kritis. Rekan-rekan Boazizi yang melihat kondisinya merasa tersulut, mereka lah kemudian pihak yang pertama memerlihatkan kemarahan dengan berkumpul di depan kantor provinsi. Mereka dengan sengaja melakukan aksi pembakaran beberapa mobil, dan menyerang gedung pemerintahan. Para petugas security yang melihat kejadian ini melakukan perlawanan, dan puluhan demonstran berhasil ditangkap.[[24]](#footnote-25)

Ben Ali mengistruksikan kepada para personil aparat yang jumlahnya sekitar 6500 untuk mengantisipasi agar gelombang demonstrasi bisa diredupkan dengan cara kasar, namun demonstrasi justeru malah semakin bergejolak. Sore hari tanggal 23 Desember 2010, untuk pertama kalinya tercatat korban dari pendemonstran yang terkena peluru aparat.[[25]](#footnote-26) Aparat mulai menggunakan peluru untuk membubarkan para demonstran.

Melihat kondisi yang semakin memanas, Ben Ali mencoba untuk menarik simpati para pemuda Tunisia dengan menjenguk Boazizi yang tengah terbaring di rumah sakit, namun lagi-lagi usahanya tidak berhasil. Demonstrasi terus berlangsung dimana-mana dan semakin membesar, walaupun banyak korban berjatuhan akibat tim keamanan dari polisi melakukan cara-cara kasar dengan menembaki penduduk sipil.

Ben Ali terus melakukan upaya untuk meredam demonstrasi, ia memutuskan untuk me*reshuffle* kabinet. Pada tanggal 29 Desember Ben Ali mengganti beberapa menteri; mentri komunikasi, perdagangan, menteri pemuda dan olah raga, menteri agama dan menteri luar negeri. Ben Ali pun meminta para menteri untuk segera mengadakan musyawarah untuk perencanaan program peluang usaha untuk para sarjana S1 yang sudah menganggur cukup lama.[[26]](#footnote-27)

Kondisi yang terjadi membuat Ben Ali terdesak, sehingga mendorongnya untuk terus membuat keputusan-keputusan baru, diantaranya pada tanggal 30 Desember Ben Ali resmi menurunkan Gubernur Provinsi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya yang ia lakukan untuk meredupkan demonstrasi.

Alih-alih meredup gelombang demonstrasi malah semakin membesar, sekitar 250 pelajar bergabung dengan barisan demonstran, yang sebagian besarnya adalah pelajar SMA. Mereka melakukan kampanye damai menyusuri jalanan ibu kota Tunisia sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan protes terhadap tingkat pengangguran dan mahalnya biaya hidup di provinsi Bouzid.

Usaha yang Ben Ali lakukan nampaknya belum cukup, gelombang demonstrasi masih terus berlangsung, hal ini terjadi karena warga Tunisia sadar sepenuhnya bahwa apa yang Ben Ali lakukan adalah intrik politik yang semuanya diarahkan pada satu tujuan, yaitu untuk meredam suara dan protes mereka.

Gelombang demonstrasi semakin bergejolak terutama setelah media mengumumkan wafatnya Bouazizi pada tanggal 4 januari 2011. Menyebarnya informasi ini mendorong warga Tunisia untuk semakin memberanikan diri melakukan tuntutan-tuntutan; mempersoalkan tingginya angka pengangguran, dan korupsi yang dilakukan para oknum pejabat pemerintahan.

Pada tanggal 10 Januari Ben Ali menampakan dirinya di layar televisi untuk menyampaikan pesannya kepada masyarakat. Dalam pidatonya ia menyebutkan bahwa para tenaga kerja Tunisia di luar negeri adalah pihak yang menjadi dalang dibalik aksi demonstrasi, ia juga mengumumkan eksekusi mati bagi para pendemonstran sambil menjelaskan bahwa demonstrasi yang terjadi di Tunisia merupakan tindak anarki dan aksi teroris.Penyataannya direspon oleh aparat sebagai sebuah isyarat untuk mengerahkan segenap kekuatan untuk memadamkan demonstrasi. Benar saja, berita tentang matinya delapan orang pendemo di kota Talah akibat tembakan aparat pun menyebar.[[27]](#footnote-28)

Betapapun usah Ben ali untuk memadamkan Demonstrasi dengan berbagai kebijakanya, rakyat Tunisia sudah tidak percaya lagi kepadanya, korupsi dinilai telah menodai nilai perjuangan rakyat untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Imbasnya adalah pengangguran merata dan tingginya biaya hidup turut mengobarkan rakyat Tunisia untuk bangkit dari keterpurukan akibat tidak adanya perhatian dari pemerintah yang berkuasa.

Oleh karena itu demonstrasi semakin menjadi, dan hal ini mendorong jubir presiden atas nama pemerintahan untuk angkat bicara pada tanggal 11 Januari bahwa aspirasi rakyat telah sampai ke meja musyawarah dan pemerintah secepat mungkin akan melakukan tindak lanjut untuk membenahi permasalahan ekonomi rakyat.

Kembali Ben Ali memecat salah satu menterinya, yaitu menteri dalam negeri. Hal itu ia lakukan ditengah-tengah terjadinya penembakan rakyat sipil oleh aparat, dan aksi-aksi kekerasan lain yang mereka lakukan. Ben Ali pun mulai memberlakukan jam malam bagi rakyat Tunisia.

Pada tanggal 13 Januari Ben Ali muncul kembai di televisi untuk menyampaikan sebuah pidato yang isinya menjelaskan bahwa ia sudah memahami keinginan rakyat, ia pun berjanji untuk memenuhi kebutuhan rakyat, dan tidak akan lagi mencalonkan diri pada pemilu Tunisia 2014 yang akan datang. Ben pun mengumumkan akan membuat pansus untuk membenahi masalah krisi yang terjadi, kebebasan pers, kebebasan beraspirasi, dan menghapuskan pengawasan terhadap internet. Selain hal tersebut Ben menjelaskan akan menurunkan harga sembako, diantaranya, harga gula, roti dan susu.

Setelah beberapa hari melakukan aksi demonstrasi, kekuasaan Presiden, akhirnya lepas pada tanggal 14 februari 2011. Setelah mengundurkan diri Zein Al-Abidin Ben Ali langsung melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan. Menyusul kemudian aksi demonstrasi yang berujung pada bentrokan dengan aparat, sejumlah demonstran tewas dan terluka, kerusuhan dan bentrokan antara anti-pemerintah dan pro-pemerintah di masing-masing negara pun terjadi.

Jabatan Presiden akhirnya lepas dari genggaman Zein al-Abidin Ben Ali ketika mengundurkan diri dari jabatan kepresidenan tanggal 14 Februari 2011 sekitar pukul 16:00 waktu setempat dan pernyataannya didelegasikan kepada Perdana Menteri Mohamed Ghannouchi untuk bertindak sebagai kepala negara selama ketidak hadirannya.

Ghannouchi menjelaskan dalam pidatonya yang disiarkan televisi bersama beberapa anggota MPR. Fuad Mabza’ dan Abdullah Qalal bahwa dirinya akan menggantikan kepemimpinan Tunisia untuk sementara waktu sesuai dengan penjelasan UU pasal 56[[28]](#footnote-29) yang menjelaskan tentang pergantian sementara kepemimpinan ketika presiden berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Ia pun menambahkan dalam pidatonya bahwa mulai saat itu tampuk kepemimpinan diserahkan kepada dirinya. Ghannochi menyerukan kepada seluruh rakyat tunis dari berbagai kelompok, kalangan dan ideologi untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan agar masa-masa krisis yang diaami Tunisia bisa segera diselesaikan.[[29]](#footnote-30)

Pada saat yang sama Ben Ali sudah berangkat ke Bandara untuk menuju Malata, namun Francis mengumumkan secara resmi bahwa mereka tidak akan menerima kedatangan Ben Ali. Sambil menunggu negara yang mau menerimanya, Ben akhirnya menuju Saudi, dan dengan tangan terbuka, Saudi menerima kedatangannya.Sampai sini revolusi Tunisia dinilai sukses. Rezin Ben Ali yang berkuasa hampir 23 tahun akhirnya tumbang. Mulai dari November 1987 sampai Januari 2011.

Penyebaran berita tentang kaburnya Ben Ali yang menyebar begitu cepat merupakan akibat dari respon negara arab dan dunia internasional yang mayoritas memihak aspirasi rakyat Tunisia. Di Amerika serikat misalkan, Barak Obama memuji keberanian rakyat Tunisia, dan menyeru mereka untuk segera melaksanakan pemilu yang luber dari segala intervensi. Dalam Pidatonya Obama berkata “*Amerika Serikat memihak rakyat Tunisia untuk menjadi saksi atas perjuangan masyarakat Tunisia demi meraih hak mereka. Kami akan terus mengingat masyarakat Tunisia sebagai simbol perjuangan untuk memperoleh kebebasan bersuara*.”[[30]](#footnote-31)

PBB dan Negara-negara lainnya pun tak luput mengucapkan selamat kepada Tunisia, Perancis, Jerman, danInggris. Adapun negara-negara Timur Tengah, hanya pemerintahan Qatar saja yang mengucapkan selamat kepada Tunisia dan secara resmi melalui kantor beritanya, Qatar berkomitmen untuk menjalin hubungan bilateral dengan Tunisia. Selain Qatar, negara arab lainnya nampak diam dan tidak bersuara.

Pujian dan ucapan selamat justeru datang bukan dari pemerintah, tapi dari masyarakat dan kelompok-kelompok di negara-negara Timur Tengah. Di Mesir, sejumlah akademisi, wartawan, penulis dan tokoh masyarakat ikut mengungkapkan rasa senang mereka dan komitmen mereka untuk membersamai kebangkitan Tunisia yang baru untuk melawan semua bentuk keditkatoran dan kezaliman.

Pimpinan majelis ulama internasional, Yusuf Qardhawi, yang sejak awal mengikuti perkembangan revolusi Tunisia pun turut mengucapkan selamat kepada rakyat Tunisia. Dalam pernyataannya Qardhawi mengumpamakan Ben Ali dengan berhala besar yang mempunyai berhala kecil. Menurut Qardhawi, runtuhnya berhala besar juga harus diikuti runtuhnya berhala-berhala kecil yang ada disekitarnya. Hal ini mengandung isyarat bahwa cita-cita revolusi tidak akan tercapai jika orang-orang yang menguasai pemerintahan selanjutnya masih orang-orang yang mempunyai ideologi seperti Ben Ali. Ghanouchi mengatakan hal yang sama bahwa menurutnya pemerintahan yang sudah membunuh nyawa manusia tidak pantas untuk ikut andil dalam merumuskan atau membangun ulang pemerintahan baru, sehingga Ghanouchi meminta agar tak satu pun anggota dari partai Ben Ali boleh terlibat dalam pembentukan pemerintahan yang baru.[[31]](#footnote-32)

Pada 23 November 2014 lalu, Tunisia akhirnya melakukan pemilihan umum secara bebas untuk pertama kalinya sejak kemerdekannya. Terpilihnya Beji Said Essebsi sebagai presiden pertama Tunisia secara demokratis menjadi awal baru bagi Tunisia dalam mengawal pemerintahan yang sarat akan kedaulatan rakyat.[[32]](#footnote-33)

1. **Arab Spring**

Pada penghujung tahun 2010 hingga awal tahun 2011, kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah mengalami pergolakan politk yang dinamakan Arab spring atau Revolusi Melati. Revolusi yang terjadi di Tunisia dengan lengsernya simbol kediktatoran dianggap sebagai sebuah permulaan peristiwa besar yang dinamakan arab spring, terjemahan dari bahasa arab *al rabî’ al ‘arabiy*, karena tidak lama dari peristiwa besar tersebut, negara arab lainnya menyusul. Revolusi-revolusi besar terjadi dalam satu musim semi yang singkat.Istilah *Arab Spring* mulanya dipopulerkan oleh media barat tahun 2011. Ada juga yang mengatakan kata *spring* merujuk pada pergolakan di eropa timur pada tahun 1989. Pada saat itu rezim-rezim komunis berjatuhan seperti efek domino, dan dalam waktu yang sangat singkat sebagian besar negara yang menganut komunis meninggalkan sistem lama untuk kemudian menuju sistem baru yaitu demokrasi, dengan ekonomi pasar.[[33]](#footnote-34)

Menurut para komentator internasiolan *Arab Spring* disebut-sebut sebagai gerakan demokrasi yang mengalir kebawah, yang bermula dari Tunisia kemudian menginspirasi negara-negara lainnya seperti Mesir, dan seterusnya. Sebagian besar demonstran yang turun ke jalan-jalan sebenarnya semangat tidak timbul karena faktor ideologis ingin negaranya menjadi demokrasi, atau ingin segera diadakan pemilu yang bebas, tapi lebih kepada faktor ekonomi yang semakin hari kian memburuk. M Chloe Mulderig menegaskan bahwa *Arab Spring* dipicu oleh kesulitan ekonomi dan aspirasi demokratik rakyat.[[34]](#footnote-35)

Revolusi *Arab Spring* seperti yang telah dijelaskan di atas, pertama kali terjadi di Tunisia. Rupanya kesuksesan rakyat Tunisia menumbangkan rezim penguasa mereka, mengilhami negara-negara lain yang memiliki kondisi yang sama dengan Tunisia.

Mesir adalah negara pertama yang terinspirasi oleh Tunisia.Masyarakat Mesir memulai revolusi pada tanggal 25 Januari 2011 dan berlangsung selama 18 hari. Pada tanggal 28, pemerintahan Mesir berhasil memutus jaringan internet di negaranya untuk mencegah terjadinya penggalangan massa besar-besaran dalam situs jejaring sosial Facebook. Beberapa hari berikutnya sebanyak sepuluh ribu warga turun ke jalan sebagai aksi protes. Revolusi yang terjadi di Mesir tentu bukan semata-mata latah melihat Tunisia yang sukses dengan revolusinya, melainkan ada sebab-sebab yang memicu terjadinya.

Penyebab revolusi mesir sangat komplek, dipicu oleh banyak hal. Diantara hal tersebut, pertama karena masyarakat mesir selama 30 tahun berada di bawah tekanan rezim mubarok sudah mulai merasa bahwa pemerintahan otoriter tidak membawa perubahan apa-apa. Masyarakat sudah tidak percaya terhadap kinerja Husni Mubarok dengan gaya kepemimpinannya yang otoriter. Kedua, Berbagai permasalahan yang terjadi di Mesir, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, korupsi dan masalah-masalah lainnya. Tercatat bahwa pada tahun 2002 angka pengangguran di Mesir mencapai 1,78 juta orang, angka tersebut terus bertambah sampai menjelang revolusi mesir terjadi, jumlah pengangguran mencapai angka 3,1 juta orang.[[35]](#footnote-36) Belum lagi masalah kebebasan, selama 30 tahun Mubarak menjabat ia memberlakukan undang-undang darurat yang melarang pertemuan lebih dari 5 orang, dengan undang-undang ini juga, aparat polisi diperkenankan untuk menangkap siapa saja yang mereka anggap melawan kekuasaan pemerintah.[[36]](#footnote-37)Ketiga, Munculnya gerakan massa berbasis sosial media yang mampu menarik banyak anggota. Mereka menamakan dirinya dengan gerakan 6 April. Gerakan ini terorganisir dengan baik, jumlah anggotanya mencapai 70.000 orang terdiri dari generasi muda dan akademisi yang menuntut lengsernya mubarok dengan jalan revolusi. Kelima, adanya dukungan dari negara digdaya sekelas Amerika. El Baradai disebut-sebut sebagai agen Amerika untuk menggulingkan Mubarak cukup punya andil dalam mengobarkan semangat rakyat mesir untuk melakukan revolusi. Dalam Twitternya Baradai menulis “*Untuk Mereka yang ikut serta mengorbankan dirinya untuk kebebasan dan kemanusiaan, negara bangga kepada kalian, yakinlah bahwa revolusi akan menang, karena kalian adalah masa depan, dan ada kekuatan yang lebih hebat selain kekuatan kebenaran*”[[37]](#footnote-38).

Revolusi di Mesir merupakan kumpulan kekecewaan publik yang selama puluhan tahun dikekang oleh rezim Husni Mubarak, kumpulan kekecewaan ini pararel dengan krisis politik di Tunisia, sehingga rakyat Mesir menemukan momentum yang tepat untuk segera menggulingkan rezim Mubarak. Kemarahan rakyat mesir yang terakumulasi bertahun-tahun akhirnya pecah. Pada tanggal 25 Januari 2011 Tahrir Square (alun-alun tahrir) dipadati oleh ribuan orang demostran. Pada percoban yang pertama kali para demostran berhasil dipukul mundur oleh aparat, menurut keterangan medis, jumlah orang yang terluka sedikitnya ada 1030 orang.

Setelah aksi demonstrasi di Mesir, akhirnya Presiden Mesir Husni Mubarak mengundurkan diri sebagai Presiden pada tanggal 11 Februari 2011. Setelah Mubarok lengser dari jabatannya, sementara parlemen diambil alih oleh majelis militer selama 17 hari.

Revolusi Melati tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tapi justru semakin meluas dan menghipnotis rakyat di Negara-negara lain seperti Libya dan Suriah yang secara geografis dan kondisi pemerintahan tidak jauh berbeda dengan Mesir.

Di Libya, aksi anti pemerintahan Muamar Kadafi dimulai pada tanggal 15 Februari 2011. Tanggal 18 Februari pasukan oposisi menguasai kota Benghazi, kota kedua terbesar di Libya setelah Tripoli. Pada tanggal 20 Februari aksi protes menyebar di kota Tripoli pasca ancaman adanya perang saudara yang diutarakan oleh Saif Islam Kadafi (anak Kadafi) melalui jaringan televisi pemerintah. Dan perang saudara terjadi memakan ribuan korban serta mendapat tekanan dari dunia internasional salah satunya dengan pengusiran para diplomat Libya. Selama perang saudara terjadi pasukan oposisi menciptakan pemerintahan sementara untuk melawan pemerintahan Kadafi. Pada tanggal 17 Maret, Resolusi Dewan Keamanan PBB membuat keputusan adanya zona larangan terbang bagi pasukan udara Libya sebagai bentuk perlindungan terhadap warga sipil di Libya. Dua hari kemudian pasukan Perancis, Amerika dan Inggris mengintervensi negara Libya dengan membombardir wilayah yang dikuasai pasukan pemerintahan Kadafi diikuti oleh koalisi pasukan militer dari 27 negara di Timur Tengah dan Eropa. Pada akhir Agustus pasukan oposisi berhasil merebut Tripoli sebagai titik akhir dalam merebut dan mengakhiri 42 tahun kekuasaan Kadafi. Kadafi bersama dengan para pejabat pemerintahannya berkumpul di kota Sirte dan menjadikan Sirte sebagai ibu kota baru negara Libya, beberapa pejabat melarikan diri ke kota Sabha dan Bani Walid serta mencari perlindungan politik ke negara sekitar. Namun kota Sabha dan Bani Walid berhasil direbut oleh pasukan oposisi. Pada tanggal 20 Oktober, pasukan oposisi berhasil mengambil alih kota Sirte dan membunuh Kadafi ditempat. Mayatnya kemudian di pajang seperti hewan, di salah satu pasar di Libya. Kesuksesan revolusi di Libya terjadi karena adanya sinergi antara tentara dan rakyat, yang hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Suriah. Ketika gelombang demonstrasi semakin memanas di Libya, satu persatu para petinggi militer rezim Kadafi melepas jabatannya dan bergabung dengan rakyat. Kenyataan ini semakin mendukung kekuatan rakyat untuk terus melakukan perlawanan terhadap rezim Kadafi.

Jika Mesir dan Libya menemukan titik terang dan berhasil menuai kemenangan dari revolusi yang terjadi, maka tidak demikian halnya dengan Suriah yang memiliki ekpektasi mampu mencapai demokrasi dengan revolusi.

Protes di Suriah dimulai pada 26 Januari, ketika muncul laporan kasus bakar diri, Para pengunjuk rasa telah menyerukan reformasi politik dan kembalinya hak-hak sipil, serta mengakhiri keadaan darurat, yang telah diterapkan sejak 1963. "*yaumul ghadab*" atau hari kemarahandilakukan selama 4-5 Februari. Pada tanggal 6 Maret, pasukan keamanan Suriah menangkap sekitar 15 orang di Daraa, Suriah Selatan, karena menulis slogan-slogan anti rezim.

Daraa adalah kota pertama yang memprotes rezim Baath (nama partai Basyar Asad), yang telah berkuasa di Suriah sejak 1963. Ribuan demonstran berkumpul di Damaskus, Aleppo, al-Hasakah, Daraa, Deir ez-Zor, dan Hama pada 15 Maret 2011. Belakangan politisi Suriah merilis Suhair Atassi menjadi juru bicara tidak resmi bagi revolusi "Suriah”. Hari berikutnya, ada laporan tentang penangkapan terhadap sekitar 3.000 orang dan beberapa mati syahid, tapi tidak ada angka resmi mengenai jumlah kematian. Pada tanggal 18 April 2011, sekitar 100.000 demonstran duduk di Alun-alun pusat Homs menyerukan pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad.

Protes terus berlanjut sampai Juli 2011, pemerintah menanggapi dengan tindakan keras dan operasi militer di beberapa kabupaten, terutama di utara Pada tanggal 31 Juli, tank tentara Suriah menyerbu beberapa kota, termasuk Hama, Deir Ez-Zour, Al-Bukamal, dan Herak di Daraa. Setidaknya 136 orang tewas dalam hari yang paling keras dan berdarah sejak pemberontakan dimulai. Pada akhir November – awal Desember, Baba Amr di distrik Homs berada di bawah kontrol oposisi bersenjata Suriah, namun dikepung setelah operasi militer besar oleh tentara Suriah.Pada awal November 2011, pemerintah Suriah terpaksa menandatangani perjanjian dengan Liga Arab di Doha, Qatar, yang isinya, antara lain, pemerintah Suriah harus mengakhiri kekerasan di Suriah, menarik militer dari desa-desa dan kota-kota Suriah, dan melakukan dialog dengan pihak oposisi di Kairo, Mesir. Namun sehari setelah itu, korban-korban rakyat sipil kembali bergelimpangan di kota Homs. Rezim Suriah tidak menerapkan perjanjian yang sudah disepakati dengan Liga Arab. Liga Arab pun mengirim puluhan tim pengawas ke Suriah untuk melihat keadaan yang sebenarnya. Tapi keberadaan tim pengawas ini mendapat kritik keras dari pihak oposisi karena rezim Suriah tetap melakukan pembunuhan terhadap demonstran, tim pengawas pun ditarik pulang. Tak tahan dengan peristiwa berdarah yang telah menelan lebih dari 6.000 orang, Liga Arab bersama Uni Eropa mengajukan kasus ini ke Dewan Keamanan (DK) PBB. Namun,untuk kedua kalinya, Rusia dan China, anggota tetap DK PBB yang punya hak veto memveto resolusi itu, meskipun resolusi itu sama sekali tidak menyinggung mengenai kemungkinan intervensi militer asing. Suriah adalah sahabat tradisionil Rusia dan pengimpor senjata Rusia sejak zaman Uni Soviet. Tetapi bukan hanya itu yang menjadi alasan China dan Rusia memveto resolusi itu, tapi karena Rusia dan China ingin memiliki pijakan di Timur Tengah yang sangat strategis. Sampai kini kekerasan masih berlangsung di Suriah dan setiap hari ada saja yang jatuh korban tewas dan ribuan lain mengungsi ke Turki dan Lebanon.

1. M. Amien Rais, *Prospek Perdamaian di Timur Tengah*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. VII. [↑](#footnote-ref-2)
2. Surwadono Siria Ahmadi, *Resolusi Konflik Di Dunia Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 207. [↑](#footnote-ref-3)
3. Jujun S. Suriasumantri, *Fisafatilmu :SebuahPengantarPopuler*(Jakarta : PustakaSinarRajawali, 1990), hlm. 128. [↑](#footnote-ref-4)
4. K.J. Holsti, *Politik Internasional:Suatu kerangka analitis, terjemahan Wawan Juanda* (Bandung: Bina Cipta, 1997), hlm. 26. [↑](#footnote-ref-5)
5. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2002). [↑](#footnote-ref-6)
6. Budiardjo, Miriam,*Dasar- Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama), hlm. 48 [↑](#footnote-ref-7)
7. Scott Burchill, Andrew Linklater dkk., *Theories of International Relations, Third Editions*(Palgrave Macmillan, 2005), hlm.29-53. [↑](#footnote-ref-8)
8. Ibid hal 549. [↑](#footnote-ref-9)
9. Ani Kartika Sari ,eJournal Ilmu Hubungan Internasional, Volume 3, Nomor 3, 2015hal. 547 - 558. [↑](#footnote-ref-10)
10. <http://globalisasi.wordpress.com/2006/7/10/pendekatan-konseptual-terhadap-transisi-demokrasi/>diakses 26 September 2016 [↑](#footnote-ref-11)
11. MenurutDr.Essam El-Haddad, salahsatupemimpinmudaIkhwanulMuslimin (IM) pasca Mubarak sangatkrusialbagimasadepanMesirbaikpolitikmaupunekonomi. [↑](#footnote-ref-12)
12. K.J. Holsti, *PolitikInternasionalSuatuKerangkaAnalisis*(TerjemahanWawanJuanda, 1987, Bandung :Binacipta), hlm. 592. [↑](#footnote-ref-13)
13. SN. Kartikasari, *MengelolaKonflik: KeterampilandanStrategiuntukBertindak* (Terjemahan SN. Kartika, Meiske D. Tapilatu, Rita Maharani, DwiatiNovitaRini), (Jakarta : The British Council, Indonesia, 2001), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-14)
14. Sidik, Fatah H, *PemikiranPolitikZamanPencerahandanReformasi* (Antara Hobbes dan Locke), dalam<http://seedhieqz.wordpress.com>diakses 17September 2016 [↑](#footnote-ref-15)
15. <http://khabarmuslim.com/pelanggaran-ham-di-mesir.html>,diakses 17September 2016 [↑](#footnote-ref-16)
16. SyafrudinBahar, *HakAsasiManusia:AnalisiKomnas HAM danJajaran HANKAM/ABRI* (Jakarta : PustakaSinarHarapan, 1997), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-17)
17. David P. Forsythe, *Human Right and World Politic* (Nebraska : University of Nebraska Press, 1989), hlm. 6. [↑](#footnote-ref-18)
18. Irenewati, Terry dan Aman. 2014. “Dampak Teori Domino Di Negara-negara Afrika Utara”. *Jurnal Penelitian Humaniora,* Vol. 19 (No. 1): hlm. 79. [↑](#footnote-ref-19)
19. http://www.aljazeera.net/news/arabic/2011/1/5/ [↑](#footnote-ref-20)
20. http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=600343&issueno=11711#.V2gEkFKfar4 [↑](#footnote-ref-21)
21. http://www.komunikasi.us/index.php/course/18-teknologi-dan-media-baru/5631-cyberpolitics [↑](#footnote-ref-22)
22. http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/timur-tengah/610-demokratisasi-dan-fenomena kebangkitan-politik-islam-di-timur-tengah [↑](#footnote-ref-23)
23. Koran *Ahram*, dalam <http://www.ahram.org.eg/archive/Issues-Views/News/54601.aspx>, diakses tanggal 10 september 2016. [↑](#footnote-ref-24)
24. Koran *Syarq el Ausath*, dalam

<http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=600343&issueno=11711#.V2gEkFKfar4>, diakses pada tanggal 10 September 2016. [↑](#footnote-ref-25)
25. Koran *Syarq el Ausath*,

<http://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=601053&issueno=11716#.V2gF6FKfar4>, diakses pada tanggal 10 September 2016 [↑](#footnote-ref-26)
26. <https://arabic.rt.com/news/60576>, diakses pada tanggal 11 September 2016. [↑](#footnote-ref-27)
27. Koran Ahram, <http://www.ahram.org.eg/archive/The-First/News/57546.aspx>, diakses pada tangal 11 September 2016. [↑](#footnote-ref-28)
28. Rajib Sirjani, *Qishah Tunis minal bidayah ilaa Tsaurah 2011*, (Kairo :Aqlam 2011), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-29)
29. Ibid, hal 99. [↑](#footnote-ref-30)
30. Rajib Sirjani, *Qishah Tunis minal bidayah ilaa Tsaurah* 2011, (Kairo :Aqlam, 2011), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-31)
31. Rajib Sirjani*, Qishah Tunis minal bidayah ilaa Tsaurah 2011*, (Kairo :Aqlam, 2011), hlm. 97. [↑](#footnote-ref-32)
32. BBC Indonesia. 23 Desember 2014. [www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/12/141223\_dunia\_pemilu\_tunisia](http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/12/141223_dunia_pemilu_tunisia), diakses 19September, 2016). [↑](#footnote-ref-33)
33. Trias Kuncahyono. 2016. “Peranan Indonesia Dalam Upaya Perdamaian Timur Tengah”. *Jurnal Penelitian AIPI(Akademi Ilmu pengetahuan Indonesia) dan Pascasarjana UIN*. [↑](#footnote-ref-34)
34. M chloe Mulderig. 2013. “An Uncertain Future: Youth Frustation and The Arab Spring”. *The Pardee Papers,* No. 16: hlm. 3. [↑](#footnote-ref-35)
35. <http://arabic.news.cn/economy/2012-05/01/c_131561647.htm>, diakses 10 September 2016. [↑](#footnote-ref-36)
36. <http://koran.tempo.co/2012/06/01>, diakses 10September 2016. [↑](#footnote-ref-37)
37. <http://arabic.cnn.com/middleeast/2016/01/24/elbaradei-bassem-25th-january-anniversary>

 , diakses 11 September 2016. [↑](#footnote-ref-38)